

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019–2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan semakin baiknya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga alokasi Belanja Modal untuk penyediaan infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan aset tetap dapat ditingkatkan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan Belanja Modal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang penggunaannya telah ditetapkan untuk kegiatan tertentu sesuai

dengan prioritas nasional, sehingga perubahan besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak secara langsung memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan Belanja Modal.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Tingkat kemandirian keuangan daerah memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga alokasinya untuk Belanja Modal dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal tetap ditentukan oleh ketentuan penggunaan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah tidak mengubah hubungan tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) secara efektif dapat mendukung peningkatan Belanja Modal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan agar kemampuan pembiayaan pembangunan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Karakteristik Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya telah ditetapkan untuk program tertentu menyebabkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran menjadi terbatas. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar pelaksanaannya semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengelolaan potensi pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang sah. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas

pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah agar alokasi Belanja Modal dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama terkait kesesuaian antara prioritas nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung pelaksanaan Belanja Modal di pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Belanja Modal, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), SiLPA, pertumbuhan ekonomi, atau ukuran pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian maupun menambah periode pengamatan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah.